

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Pemahaman publik terhadap pemberitaan Aksi Kamisan dapat ditelusuri lewat pendekatan studi media, khususnya melalui konsep jurnalisme advokatif. Rakhmawati (2015) menyoroti bagaimana jurnalisme yang berpihak mampu menjadi ruang aman bagi korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan semacam ini bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga berupaya mengangkat suara-suara yang terpinggirkan, mendorong masyarakat untuk peduli dan membangun kesadaran kolektif terhadap keadilan sosial.

Di sisi lain, penelitian Burgoon et al. (2015) menunjukkan bagaimana perhatian media terhadap isu pelanggaran HAM dapat mempercepat penyelesaian konflik sipil. Sorotan media yang konsisten terhadap ketidakadilan, apalagi jika diikuti oleh tekanan dari lembaga internasional, diyakini bisa memicu proses damai antara pihak-pihak yang bertikai. Meskipun tidak menyoroti gerakan Aksi Kamisan secara langsung, studi ini tetap relevan karena memperlihatkan kekuatan media dalam mempengaruhi dinamika sosial dan politik melalui pemberitaan yang bersifat advokatif.

Pendekatan relasi antara media dan gerakan sosial juga dikaji oleh Rohlinger dan Corrigan-Brown (2018). Mereka menelusuri bagaimana kelompok-kelompok aktivis secara strategis menggunakan media digital maupun konvensional untuk menyebarkan pesan, membangun citra gerakan, dan memengaruhi persepsi publik. Dalam konteks Aksi Kamisan, hasil penelitian ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana media seperti *Kompas.id* dapat memainkan peran kunci dalam memperluas jangkauan pesan dan memfasilitasi pemahaman Generasi Z terhadap isu HAM melalui narasi yang berpihak.

Saling keterhubungan antara media dan gerakan sosial juga menjadi sorotan Vliegenthart dan Walgrave (2012). Mereka menggarisbawahi bahwa

media bukan hanya saluran informasi, tetapi juga wadah strategis bagi gerakan sosial untuk memperoleh eksposur dan memperluas dampak kampanye mereka. Di sisi lain, media juga kerap memanfaatkan isu-isu gerakan sosial untuk menarik perhatian audiens. Dalam kaitannya dengan Aksi Kamisan, bagaimana *Kompas.id* membingkai isu ini akan sangat menentukan apakah pesan yang disampaikan mampu membuka ruang bagi dialog publik seputar hak asasi manusia.

Happer dan Philo (2013) juga menekankan bahwa media bukan hanya penyalur informasi, tetapi memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Dengan memilih sudut pandang tertentu dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa, media memiliki kuasa untuk mengarahkan perhatian publik. Pemikiran ini sejalan dengan fokus penelitian ini, yaitu menggali bagaimana pembedaan berita oleh *Kompas.id* dapat memengaruhi kesadaran dan sikap Generasi Z terhadap gerakan Aksi Kamisan.

Studi yang dilakukan oleh Alwaton (2023) memberikan ilustrasi bagaimana jurnalisme advokatif dijalankan oleh media alternatif seperti Project Multatuli. Melalui liputan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Project Multatuli secara tegas menunjukkan keberpihakannya terhadap komunitas adat yang terdampak. Meski berfokus pada isu yang berbeda, studi ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana praktik jurnalisme advokasi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh media besar, tetapi juga oleh media independen yang konsisten dalam membela kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Hak ini dapat menjadi cerminan untuk melihat sejauh mana media arus utama seperti *Kompas.id* menjalankan fungsi advokatif dalam isu Aksi Kamisan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Judul	Peneliti	Kelebihan	Kekurangan
Jurnal 1	Jurnalisme Advokatif: Solusi Pemberitaan Anak Korban	Rakhmawati (2015)	Penelitian ini menyoroti kekuatan jurnalisme advokasi sebagai	Fokus penelitian terbatas pada konten pemberitaan

	Kekerasan Seksual		pendekatan pemberitaan yang berpihak kepada korban, khususnya anak-anak korban kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang keberpihakan dan pendampingan korban.	dan proses produksi media, tanpa mengeksplorasi bagaimana audiens merespons pemberitaan tersebut. Selain itu, konteks kasus yang diangkat berbeda dari Aksi Kamisan, meskipun prinsip advokatifnya tetap sejalan.
Jurnal 2	<i>From Media Attention to Negotiated Peace: Human Rights Reporting and Civil War Duration</i>	Burgoon et al. (2015)	Penelitian ini menjelaskan secara menyeluruh bagaimana pelaporan media atas isu pelanggaran HAM dapat memengaruhi arah dan durasi konflik sipil. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kekuatan media sebagai alat tekan terhadap aktor-aktor konflik.	Meskipun relevan dalam menyoroti peran media, konteks penelitian ini berfokus pada konflik sipil bersenjata dan bukan pada gerakan sosial sipil seperti Aksi Kamisan. Selain itu, kurangnya variasi data dan kedalaman temporal menjadi catatan tersendiri.
Jurnal 3	<i>Social Movements and</i>	Rohlinger &	Penelitian ini memberikan	Fokus utama berada pada

	<i>Mass Media in a Global Context</i>	Corrigall Brown (2018)	tinjauan komprehensif mengenai hubungan antara gerakan sosial dan media massa dalam konteks global, menyoroti peran media dalam membentuk dinamika gerakan sosial dan menjelaskan bagaimana gerakan sosial menggunakan media untuk mencapai tujuan mereka.	gerakan sosial dalam sistem media terbuka. Sehingga, belum cukup mengulas bagaimana strategi media dilakukan dalam konteks media yang represif atau tertutup seperti yang mungkin terjadi di Indonesia.
Jurnal 4	<i>The Interdependency of Mass Media and Social Movements</i>	Vliegenthart & Walgrave (2012)	Studi ini memberikan pemahaman tentang hubungan saling ketergantungan antara media dan gerakan sosial, menunjukkan bahwa media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga sarana untuk visibilitas gerakan dan pencapaian tujuan politik.	Penelitian ini lebih banyak membahas aspek politis dan strategi liputan gerakan secara umum, tetapi belum secara mendalam mengupas bagaimana respons audiens terhadap narasi yang dibangun media.
Jurnal 5	<i>The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change</i>	Happer & Philo (2013)	Penelitian ini membahas secara rinci bagaimana media, melalui pbingkaiian	Kompleksitas hubungan antara pesan media dan respons audiens

			isu, membentuk pemahaman, keyakinan, dan sikap publik terhadap isu-isu sosial tertentu. Wawasan ini menjadi penting untuk memahami pengaruh media dalam proses perubahan sosial.	menjadikan hasil penelitian ini sulit untuk digeneralisasi secara pasti. Variasi sikap audiens juga menimbulkan tantangan dalam menarik kesimpulan yang universal.
Jurnal 6	<i>Jurnalisme Advokasi pada Project Multatuli dalam Isu IKN Nusantara</i>	Yogie Alwaton (2023)	Penelitian ini memperlihatkan bagaimana media alternatif menjalankan jurnalis advokatif melalui peliputan isu pembangunan IKN dengan keberpihakan pada masyarakat adat yang terdampak. Hal ini memperlihatkan praktik nyata jurnalisme advokasi di Indonesia.	Penelitian ini terbatas pada satu isu dan satu media alternatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk konteks pemberitaan yang lebih luas atau media arus utama. Selain itu, tidak terdapat kajian terhadap dampak pemberitaan bagi audiens.

Sumber: Olahan peneliti

Dari berbagai studi yang telah dikaji, terlihat bahwa sebagian besar membahas peran media dalam mengadvokasi isu-isu sosial dan membentuk persepsi publik. Namun, masih minim penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana Generasi Z—sebagai audiens digital yang

aktif–memaknai berita advokatif dari media arus utama dalam konteks lokal seperti Aksi Kamisan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah lebih dalam bagaimana Generasi Z memaknai pemberitaan Aksi Kamisan oleh *Kompas.id* dan bagaimana hal itu membentuk kesadaran serta sikap mereka terhadap isu-isu hak asasi manusia.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Teori *Agenda Setting*

Teori *agenda setting* pertama kali diujikan pada 1968, saat ada penelitian tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan adanya korelasi erat antara isu-isu yang sering diberitakan di media dengan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat (Griffin, 2012, p. 378). Hasil penelitian tersebut menjadi landasan hipotesis teori *agenda setting*, menyoroiti bagaimana suatu topik dapat dianggap lebih penting oleh masyarakat melalui pengaruh media (Nuruddin, 2006, p. 195).

Penemuan dalam penelitian tersebut memberikan landasan bagi Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dalam mengembangkan teori *agenda setting* pada tahun 1972 (Lubis, 2007, p. 106). Dalam bukunya yang berjudul *The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the shaping of Public Opinion* (2004, p.2), Maxwell menjelaskan bahwa teori ini lahir dari temuan bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi, mengatur, dan memberikan arahan kepada khalayak mengenai apa yang seharusnya mereka pikirkan. Esensi dari teori ini adalah media tidak memberi tahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi menentukan isu-isu yang seharusnya menjadi perhatian kita.

Dalam kehidupan sehari-hari, tentu terdapat banyak peristiwa penting dan menarik yang layak diliput. Namun, keterbatasan ruang membuat media harus menentukan mana yang akan diberitakan dan mana

yang akan diabaikan. Media juga memutuskan isu-isu apa yang perlu diutamakan, mana yang kurang mendapat perhatian, atau bahkan sama sekali tidak diungkap. Menurut Griffin, yang dikutip dalam Kriyantono, menjelaskan bahwa media pada dasarnya menyusun agenda berita yang akan disampaikan kepada audiens dan proses tersebut melibatkan unsur subjektivitas dari pihak media (Kriyantono, 2006, p. 26).

Everett Rogers dan James Dearing, seperti yang dijelaskan oleh Morissan (2013, p. 498), menguraikan bahwa dalam *agenda setting*, terdapat tiga tahap agenda yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah agenda media, yaitu prioritas yang ditentukan oleh media dalam meliput suatu isu. Tahap kedua adalah agenda publik, media dapat memengaruhi atau berinteraksi dengan pandangan masyarakat, yang kemudian menghasilkan agenda publik. Tahap ketiga adalah agenda kebijakan, yang terjadi ketika agenda publik berinteraksi dengan isu-isu yang dianggap penting oleh para pembuat kebijakan sehingga membentuk agenda kebijakan.

Apa yang disajikan oleh media kepada audiensnya merupakan suatu agenda yang dibentuk melalui pemilihan isu-isu yang terjadi pada periode tersebut. Derajat peliputan suatu peristiwa juga menjadi elemen penting dalam pembentukan agenda media (Janowitz & Hirsch, 1981, p. 326). Mengenai hubungan antara agenda media dan agenda publik, McLeod dan koleganya berpendapat, "...audiens yang terpapar oleh agenda media akan menyesuaikan pandangannya terhadap pentingnya suatu isu berdasarkan arahan yang diberikan oleh media melalui urutan isu yang disorot, dengan mempertimbangkan indikator yang digunakan oleh mereka" (Janowitz & Hirsch, 1981, p. 330).

Selain itu, McCombs mengembangkan teori *agenda setting* dengan penjelasan teori framing oleh Tankard dalam (Griffin, 2006, p. 401), yang menyatakan bahwa *framing* adalah proses pengorganisasian utama dalam

konten berita yang memberikan konteks dan arahan melalui seleksi, penekanan, pengecualian, dan elaborasi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya memiliki kemampuan untuk menetapkan agenda untuk isu tertentu, tetapi juga dapat menentukan objek-objek yang dianggapnya penting.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori *agenda setting* menegaskan bahwa media memiliki peran yang signifikan dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Melalui seleksi, penekanan, dan *framing* yang diterapkan dalam pemberitaan, media tidak hanya mengarahkan perhatian audiens pada topik tertentu, tetapi juga membentuk persepsi dan prioritas mereka terhadap isu-isu tersebut. Dengan demikian, media memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara masyarakat memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dan memberikan kerangka acuan untuk menanggapi berbagai isu yang berkembang, seperti yang terlihat pada pengaruh media terhadap persepsi publik dalam gerakan sosial atau kebijakan tertentu.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, teori ini menegaskan bahwa paparan media, khususnya televisi, memiliki pengaruh yang mendalam dalam membentuk cara pandang dan persepsi audiens terhadap berbagai isu sosial. Melalui interaksi yang berkelanjutan dengan konten media yang membahas Aksi Kamisan, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga menyerap sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan gerakan tersebut. Selaras dengan pandangan Gerbner, media massa berperan dalam menanamkan dan menyebarkan sikap tertentu yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami serta menanggapi isu-isu keadilan dan HAM.

2.2.2 Agenda Publik

Jika agenda politik mencakup isu atau masalah yang menjadi perhatian utama pembuat kebijakan pada waktu tertentu (Kingdon, 1984), agenda publik lebih berfokus pada isu-isu yang paling sering diperbincangkan

oleh masyarakat, atau kecemasan yang berkembang dalam konteks sosial yang lebih luas. Ketika suatu isu masuk ke dalam agenda publik, isu tersebut cenderung memiliki peluang lebih besar untuk dimasukkan ke dalam agenda politik yang resmi.

Penetapan agenda dalam opini publik merupakan langkah penting untuk mencapai perubahan kebijakan. Pandangan ini dikemukakan oleh Cobb dan Elder (1972), yang membedakan antara agenda “sistemik” dan “institusional”. Agenda sistemik mencakup “semua isu yang secara umum dianggap oleh anggota komunitas politik sebagai masalah yang layak mendapat perhatian publik” (Cobb dan Elder, 1972, p. 85). Sebelum suatu isu dapat dimasukkan ke dalam agenda sistemik, isu tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Publik harus menyadari adanya masalah.
- a. Sering kali melalui liputan media.
- b. Terdapat konsensus bahwa tindakan perlu diambil.
- c. Pemerintah harus dianggap mampu menangani masalah tersebut.

Sementara itu, agenda institusional merujuk pada “daftar hal-hal yang secara eksplisit dipertimbangkan secara aktif dan serius oleh pengambil keputusan yang memiliki kewenangan” (Cobb dan Elder, 1972, p. 86). Ketika suatu isu mendapatkan perhatian dari pihak eksekutif, legislatif, atau yudikatif, hal ini menjadi tanda awal kemungkinan adanya perubahan kebijakan (Jones dan Baumgartner, 2004, p. 2). Dengan demikian, agenda publik berperan dalam mencerminkan berbagai masalah yang lebih luas dalam masyarakat yang dianggap memerlukan perhatian. Masalah-masalah ini kemudian masuk ke dalam “alur masalah” (Kingdon, 1984), yaitu isu-isu yang menjadi fokus perhatian pengambil keputusan di dalam sekitar pemerintahan.

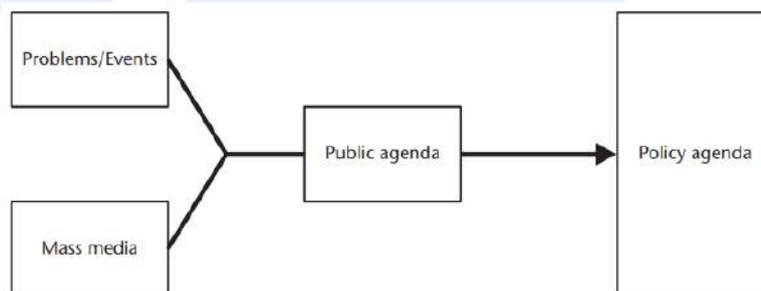
Disisi lain, McLeod dalam Chafee (1975, p. 50), membagi agenda publik ke dalam tiga bentuk utama. Pertama adalah *individual issue salience*, penilaian seseorang terhadap pentingnya suatu isu berdasarkan prioritas pribadi. Kedua, *perceived issue salience*, yang menggambarkan persepsi individu mengenai apa yang dianggap penting oleh orang lain di sekitarnya. Ketiga, *community issue salience*, yaitu penekanan pada isu berdasarkan pandangan bersama dalam suatu komunitas sosial, bukan dari sudut pandang individu.

Seperti yang diamati oleh Jones (1994), perubahan dalam *salience* suatu isu dapat terjadi baik karena perubahan dalam fakta dasar dari situasi atau karena makna yang diberikan kepada “fakta” tersebut berubah. Sebagai contoh, perhatian publik terhadap kejahatan dapat meningkat baik karena peningkatan korban kejahatan atau karena media dan elit politik mulai memandang isu ini sebagai masalah yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa agenda publik cenderung mencerminkan dengan erat “status masalah” dari isu tertentu (seperti yang dikemukakan oleh Hibbs, 1979; Hudson, 1994).

Bagaimana agenda publik dapat memengaruhi kebijakan politik? Secara umum, jika sebuah isu menarik perhatian masyarakat, maka isu tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dianggap penting oleh pembuat kebijakan dan dimasukkan dalam agenda formal (seperti yang dijelaskan oleh Cobb dan Elder, 1972; Kingdon, 1984; Baumgartner dan Jones; 1993). Ketika perhatian masyarakat terfokus pada masalah tertentu, prioritas kebijakan pemerintah sering kali akan sejalan dengan prioritas isu yang diangkat oleh publik (Jones dan Baumgartner, 2004; Jones et al., 2009; Chaques-Bonafont dan Palau, 2011; Lindeboom, 2012; Alexandrova et al., 2016).

Beberapa penelitian bahkan mengharapkan terjadinya keselarasan antara agenda publik dan kebijakan seiring berjalannya waktu (Jennings

dan John, 2009; John et al., 2011; Bevan dan Jennings, 2014). “Representasi agenda dinamis” merujuk pada proses bagaimana prioritas isu yang ada di masyarakat diterjemahkan menjadi prioritas kebijakan oleh pemerintah (Bevan dan Jennings, 2014). Meskipun masyarakat dan pembuat kebijakan bisa saja menanggapi masalah secara bersamaan, keselarasan antara agenda publik dan kebijakan menunjukkan sejauh mana demokrasi berjalan dengan baik. Namun, hal ini tidak selalu berarti bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan keinginan atau preferensi masyarakat (Jennings dan Wlezien, 2015). Hubungan potensial antara masalah atau peristiwa, media massa, masyarakat, dan agenda kebijakan dijelaskan dalam Gambar 2.1 meskipun tidak semua kemungkinan hubungan tercakup di dalamnya.



Gambar 2.1 Model agenda publik dan kebijakan

Sumber: Comparative Agendas Project

Konsep agenda publik memainkan peran penting dalam memahami bagaimana isu-isu tertentu mendapatkan perhatian masyarakat dan memengaruhi pola pikir serta tindakan individu, termasuk Generasi Z. Dalam konteks penelitian ini, agenda publik membantu menjelaskan pandangan Generasi Z terhadap isu-isu sosial. Pemahaman ini relevan untuk mengkaji apakah pemberitaan *Kompas.id* berhasil menarik perhatian Generasi Z terhadap isu pelanggaran HAM dan apakah pemberitaan ini memengaruhi keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam aksi sosial.

2.2.3 Jurnalisme Advokasi

Dalam konteks media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berpihak pada isu-isu sosial tertentu, jurnalisme advokasi hadir sebagai pendekatan jurnalistik yang menyuarakan keberpihakan secara terang. Konsep ini merujuk pada praktik jurnalistik yang tetap berpijak pada proses peliputan berbasis data dan fakta, tetapi dengan orientasi membela kelompok atau isu yang mengalami ketidakadilan (Pamungkas & Supriadi, 2022, p. 22). Alih-alih bersikap netral sebagaimana prinsip jurnalisme konvensional, pendekatan ini justru mengizinkan jurnalis menyisipkan opini yang bersifat memperkuat pesan keadilan sosial, selama tetap berdasar pada kebenaran dan bukan manipulatif.

Menurut Irmawati (dalam Salma & Gani, 2020, p. 105), jurnalisme advokasi menempatkan jurnalis bukan semata sebagai pelapor fakta, tetapi juga sebagai representasi kepentingan masyarakat—khususnya mereka yang tidak memiliki akses setara terhadap media arus utama. Praktik ini lahir dari kesadaran untuk menghadirkan keadilan dalam ruang publik, dengan memberdayakan suara-suara yang selama ini terpinggirkan.

Lebih lanjut, Setiati (dalam Putra & Astuti, 2022, p. 127) mengemukakan bahwa jurnalisme advokasi memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya fokus isu yang jelas, penekanan pada kelompok yang terdampak, keberpihakan terhadap sumber utama yang berkaitan dengan isu, serta adanya dorongan legal dan harapan perubahan sosial. Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk melihat bagaimana *Kompas.id* memaknai Aksi Kamisan bukan hanya sebagai peristiwa mingguan, tetapi sebagai isu kemanusiaan yang menuntut perhatian publik dan keberpihakan media.

Sejalan dengan itu, Agustin (2023) merumuskan langkah-langkah praktis yang menjadi panduan dalam menerapkan jurnalisme advokasi.

- 1) Jurnalis perlu mengenali dan merumuskan isu yang ingin diangkat melalui pengumpulan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sumber.
- 2) Proses verifikasi menjadi bagian krusial, jurnalis diharapkan bersikap kritis dan melakukan pengecekan berulang terhadap data serta memahami kerangka regulasi yang berkaitan.
- 3) Selain mengangkat masalah, pemberitaan juga harus diarahkan pada pencarian solusi yang menyentuh akar persoalan.
- 4) Memilih narasumber yang mampu menyampaikan perspektif yang mendalam dan mencerminkan keberagaman suara dalam isu yang diangkat.
- 5) Narasi yang disusun pun harus memiliki arah yang jelas, memperhatikan karakteristik audiens, dan menggunakan bahasa yang komunikatif agar pesan dapat diterima oleh khalayak luas.
- 6) Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek yang penting, jurnalisme advokasi idealnya mampu mendorong keterlibatan aktif dari publik dalam mendorong perubahan.
- 7) Penting bagi jurnalis untuk mengevaluasi dampak dari kerja jurnalistik mereka, termasuk menilai sejauh mana pemberitaan mampu mempengaruhi kebijakan atau mendorong tindakan nyata di lapangan.

Rangkaian proses ini menegaskan bahwa jurnalisme advokasi bukan sekadar strategi penyampaian berita, tetapi juga merupakan praktik jurnalistik yang berorientasi pada perubahan sosial. Dalam kaitannya dengan Aksi Kamisan, tahapan ini menjadi acuan untuk menilai apakah pemberitaan *Kompas.id* benar-benar mampu membangun kesadaran kritis, khususnya di kalangan Generasi Z, terhadap isu-isu pelanggaran HAM yang selama ini belum terselesaikan.

2.2.4 Persepsi

Dalam melihat bagaimana individu memahami suatu isu, persepsi menjadi salah satu kunci utama yang tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi. Jalaluddin Rakhmat (2007, p. 51) menyebut persepsi sebagai hasil dari pengalaman terhadap objek, peristiwa, atau hubungan sosial yang terbentuk melalui proses penafsiran terhadap informasi yang diterima. Proses ini memungkinkan seseorang memberi makna terhadap sesuatu berdasarkan pengalamannya.

Sejalan dengan itu, Deddy Mulyana (2003, p. 167) menyebut persepsi sebagai proses internal yang berjalan saat seseorang memilih dan mengorganisir rangsangan dari lingkungan sekitarnya, kemudian menafsirkan rangsangan tersebut sehingga membentuk suatu pemahaman. Hal ini berarti persepsi bukan sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan aktif melibatkan penilaian yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang individu.

Dalam pandangan William James (dalam Sumanto, 2014, p. 52), persepsi merupakan cara seseorang memberikan makna pada informasi yang diterima, yang pada akhirnya membentuk pendapat atau sikap tertentu. Hal ini mempertegas bahwa persepsi setiap individu bisa berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Sugihartono (2007, p. 8) menambahkan bahwa perbedaan dalam persepsi dapat terlihat dari bagaimana individu memberikan respons yang bervariasi, baik berupa sikap positif, negatif, maupun netral terhadap suatu objek atau isu.

Lebih lanjut, Bimo Walgito (2003) menjelaskan bahwa persepsi terbentuk melalui tiga tahap sebagai berikut:

- 1) **Penyerapan** terjadi saat seseorang menerima rangsangan dari luar melalui indera.

- 2) **Pemahaman**, informasi ini kemudian diproses dalam tahap pemahaman, yang berarti individu mulai menyusun dan mengelompokkan makna dari informasi tersebut.
- 3) **Evaluasi**, ketika seseorang mulai menarik kesimpulan berdasarkan pemahamannya dan menentukan sikap yang akan diambil, apakah menerima, menolak, atau bersikap netral (Walgito, 2002).

Beberapa faktor turut memengaruhi bagaimana persepsi terbentuk. Rakhmat (2011) membaginya menjadi tiga:

- 1) **Faktor perhatian**, yaitu saat seseorang lebih fokus pada suatu stimulus yang dianggap lebih menonjol dibandingkan yang lain
- 2) **Faktor personal**, yang berasal dari pengalaman dan kebutuhan individu
- 3) **Faktor situasional**, yang berkaitan dengan karakteristik stimulus dan reaksi fisiologis terhadapnya.

Hal ini selaras dengan pandangan Notoatmodjo (2003) yang menekankan bahwa persepsi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman, pengetahuan, serta sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap orang.

Persepsi berkaitan erat dengan sikap. Robins (2008, p. 175) menyebut bahwa persepsi memengaruhi bagaimana seseorang menerima atau menolak suatu informasi. Hal ini berarti, respons seseorang terhadap informasi tidak hanya bergantung pada isi pesannya, melainkan juga pada bagaimana pesan itu ditangkap dan dimaknai. Dalam konteks penelitian ini, persepsi menjadi penting untuk melihat bagaimana Generasi Z memandang pemberitaan *Kompas.id* terkait Aksi Kamisan, apakah sebagai bentuk keberpihakan media terhadap isu HAM atau hanya sekadar informasi berita.

Melalui konsep ini, peneliti ingin memahami bagaimana Generasi Z, sebagai kelompok audiens digital yang terbiasa berinteraksi dengan

media online, menafsirkan pesan yang disampaikan media arus utama. Persepsi menjadi titik awal dalam menilai apakah pemberitaan mampu membentuk kesadaran dan sikap mereka terhadap isu-isu kemanusiaan. Oleh karena itu, persepsi dipandang bukan hanya sebagai proses kognitif, tetapi juga sosial—yang menggambarkan bagaimana latar belakang, pengalaman, dan cara pandang membentuk respons terhadap suatu realitas yang dikonstruksikan media.

2.2.5 Media and Social Movements

Hubungan antara media dan gerakan sosial bersifat saling membutuhkan dan saling memengaruhi. Todd Gitlin (1980), dalam penelitiannya *The Whole World is Watching* menunjukkan bahwa media memiliki peran sentral dalam membentuk narasi gerakan sosial, membantu mereka mendapatkan dukungan publik melalui pembingkaihan yang menarik perhatian masyarakat. Namun, Gitlin juga mencatat bahwa kebutuhan media terhadap elemen-elemen yang dianggap *newsworthy* seperti drama, konflik, dan personalisasi dapat mengubah fokus gerakan menjadi lebih strategis terhadap media daripada substansi perjuangan mereka (dalam Stefaan Walgrave, 2021, p. 4).

Gamson dan Wolfsfeld (1993) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa media menyediakan platform penting untuk menyebarkan pesan gerakan sosial dan memperluas jangkauan pengaruhnya. Di sisi lain, media memperoleh manfaat dengan menggunakan gerakan sosial sebagai sumber berita yang relevan dan menarik bagi audiens. Dengan demikian, hubungan ini menciptakan simbiosis, dalam artian media dan gerakan sosial saling memanfaatkan untuk mencapai tujuan masing-masing.

Gamson dan Wolfsfeld (1993, p. 116), menyatakan bahwa media memiliki peran yang jauh lebih penting bagi gerakan sosial dibandingkan

sebaliknya. Terdapat tiga alasan utama yang menjelaskan kebutuhan gerakan sosial terhadap media

1. Media menjadi alat penting untuk memobilisasi masyarakat. Dengan adanya pemberitaan yang meluas, gerakan sosial dapat menarik perhatian publik, memperoleh dukungan, dan mengajak orang-orang baru untuk bergabung dalam kegiatan mereka.
2. Gerakan sosial memerlukan pengakuan formal dari publik, yang disebut validasi. Validasi ini terjadi ketika media mengangkat isu atau aktivitas mereka sehingga keberadaan gerakan sosial menjadi diketahui dan diakui oleh khalayak yang lebih luas (Gamson & Wolfsfeld, 1993, p. 116).
3. Gerakan sosial membutuhkan perluasan. Melalui liputan media, gerakan sosial dapat memperluas jangkauan pengaruhnya dan merekrut anggota baru yang sebelumnya belum mendukung gerakan tersebut.

Sydney Tarrow, seorang ahli terkemuka dalam studi gerakan sosial yang telah mempelajarinya sejauh tahun 1960-an, mendeskripsikan bahwa gerakan sosial adalah bentuk tantangan kolektif yang diarahkan kepada otoritas atau kelompok-kelompok berkuasa, tantangan ini berakar pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, serta berlangsung melalui interaksi yang berkelanjutan dengan elit, oposisi, dan otoritas (Tarrow, 1998, p. 4). Gerakan sosial melibatkan banyak individu yang memiliki tujuan bersama serta rasa solidaritas dan identitas kolektif, yang dibangun berdasarkan pengalaman atau nilai-nilai yang sama. Kelompok-kelompok ini berusaha menentang otoritas kuat, seperti pemerintah maupun perusahaan, yang mereka anggap bertanggung jawab atas keluhan mereka atau memiliki kapasitas untuk mengatasinya (Kolb, 2007, p. 5).

Dengan munculnya internet, sebagian besar ilmuwan gerakan sosial fokus pada media massa tradisional seperti radio, surat kabar, majalah, buku, rekaman, dan film. Media-media ini menyebarkan ide-ide gerakan kepada audiens yang luas, membantu aktivis merekrut anggota, memberikan leverage bagi anggota dalam debat kebijakan, dan membantu mobilisasi publik. Media juga memengaruhi bagaimana elit politik menanggapi gerakan sosial dan protes dari gerakan sosial (Wisler, Giugni, 1999; Knight, 2001).

2.2.6 Youth in Media

Di Indonesia, pemuda didefinisikan sebagai individu berusia produktif antara 16 hingga 30 tahun, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Karakteristik pemuda sebagai *digital natives* tercermin dari kebiasaan mereka menghabiskan waktu luang dengan mengakses media baru, yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya digital yang terus berkembang (Widyarto et al., 2015).

Dalam konteks ini, pemuda dan media baru memiliki hubungan saling memengaruhi, baik dalam proses produksi maupun konsumsi budaya media dan budaya anak muda. Media di era digital menawarkan banyak manfaat, termasuk sebagai alat untuk mengatasi tantangan komunikasi (Muhtar & Rohman, 2023, p. 2981) dan sebagai sarana yang mendukung proses demokratis dengan menyediakan akses informasi yang luas dan tanpa batas bagi masyarakat global (Priyono & Hamid, 2014).

Partisipasi pemuda dalam media juga mencerminkan keterkaitan mereka terhadap lingkungan sekitar, terutama ketika diberikan ruang untuk menyuarakan pandangan mereka secara bermakna terkait isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka (Gigli, 2006). Keterlibatan ini memberikan banyak manfaat positif, seperti yang dirangkum dalam

Yearbook Outlooks on Children and Media UNESCO Clearinghouse (Feilitzen & Bucht, 2001):

- a. Meningkatkan rasa percaya diri, kebanggaan, dan kekuatan diri karena mereka merasa suara mereka didengar, menjadi bagian dari komunitas, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang orang lain dan budaya mereka sendiri.
- b. Munculnya keinginan untuk melihat impian, budaya sosial, etnis, serta realitas lokal mereka direpresentasikan dalam media.
- c. Pengembangan keterampilan, rasa ingin tahu, dan literasi media yang lebih baik, termasuk kemampuan untuk memahami media secara kritis.
- d. Mendorong keadilan sosial dengan memberikan peluang kepada kaum muda yang kurang berhasil dalam sistem pendidikan berbasis cetak tradisional untuk berkontribusi dalam produksi media audio-visual
- e. Peningkatan partisipasi dan kepedulian terhadap masyarakat, yang kemudian menginspirasi mereka untuk beraksi dalam memperbaiki pemberitaan mengenai isu-isu kaum muda di media dan kondisi di komunitas mereka.

Dalam konteks penelitian peneliti, konsep ini relevan karena menunjukkan potensi media untuk memengaruhi persepsi, pemahaman, dan sikap pemuda terhadap isu-isu sosial dan HAM. Generasi Z, sebagai kelompok yang akrab dengan media digital, tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga memiliki kapasitas untuk menilai, menyaring, dan bahkan membentuk narasi melalui media. Oleh karena itu, memahami interaksi antara Generasi Z dan media dalam topik ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana media massa menciptakan

kesadaran kolektif, memengaruhi opini publik, dan mendorong aksi sosial di kalangan generasi muda.

2.3 Alur Penelitian

Penelitian ini dilandasi oleh keprihatinan terhadap minimnya kesadaran sosial dan rendahnya partisipasi Generasi Z dalam merespons isu-isu hak asasi manusia, meskipun pemberitaan mengenai pelanggaran HAM kerap muncul di media arus utama. Salah satu bentuk peristiwa yang menjadi simbol perlawanan atas impunitas negara adalah Aksi Kamisan. Aksi ini merupakan gerakan sosial yang telah berlangsung secara konsisten sejak tahun 2007 dan bertujuan untuk menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat. Namun, hingga saat ini, aksi tersebut belum menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan dari pihak pemerintahan.

Dalam konteks ini, media memiliki peran penting sebagai perantara antara suara korban dan kesadaran publik. *Kompas.id* sebagai salah satu media digital arus utama yang aktif memberitakan isu-isu kemanusiaan, termasuk Aksi Kamisan, menggunakan pendekatan jurnalisme advokasi. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga bertujuan menyuarakan keadilan dan berpihak pada kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelusuri sejauh mana jurnalisme advokasi yang dijalankan *Kompas.id* dapat membentuk persepsi dan memengaruhi sikap sosial Generasi Z sebagai bagian dari audiens digital.

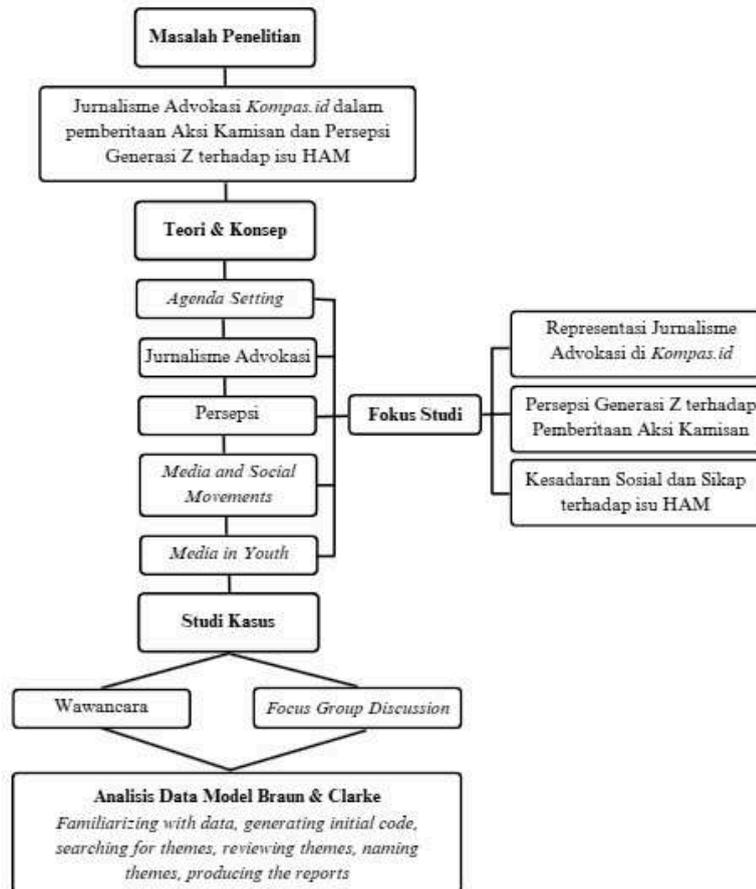
Sebagai kelompok yang lahir dan tumbuh di tengah arus informasi digital, Generasi Z memiliki karakteristik konsumsi media yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka akrab dengan teknologi, kritis terhadap isu sosial, tetapi juga sering kali menunjukkan sikap apatis terhadap isu yang tidak relevan dengan keseharian mereka. Maka dari itu, penting untuk mengkaji bagaimana kelompok ini memaknai pemberitaan media yang bersifat advokatif dan apakah narasi yang dibangun media mampu menggugah kesadaran sosial mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yang pertama wawancara mendalam dengan tiga jurnalis *Kompas.id* yang terlibat langsung dalam peliputan isu-isu HAM dan Aksi Kamisan. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali proses produksi berita, nilai-nilai yang ingin disampaikan, serta bagaimana mereka memaknai praktik jurnalisisme advokasi yang mereka jalankan. Kedua, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa partisipan Generasi Z untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan isi pemberitaan tersebut, serta bagaimana pemberitaan itu berpengaruh terhadap pandangan dan sikap mereka terhadap isu HAM.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berpijak pada konsep jurnalisisme advokasi untuk melihat peran media dalam menyuarakan keadilan, serta konsep persepsi untuk menelaah bagaimana pesan media ditangkap, dimaknai, dan direspons oleh audiens. Selain itu, digunakan pula konsep *media and social movement* untuk memahami posisi media sebagai kekuatan sosial yang dapat mendukung perubahan, serta *youth and media* untuk menggambarkan bagaimana Generasi Z membentuk hubungan dengan media dan isu-isu sosial di dalamnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama sejauh mana jurnalisisme advokasi *Kompas.id* dalam memberitakan Aksi Kamisan dapat membentuk persepsi dan memengaruhi sikap sosial Generasi Z terhadap isu hak asasi manusia di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas media dalam mendukung gerakan sosial dan membangun kesadaran kolektif melalui pemberitaan yang berpihak pada keadilan.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Oleh peneliti

